



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 7 (tujuh)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI
2. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI
36 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); Taruna Ikrar, beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibuka pukul 10.07 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR mendesak Badan POM RI menyusun peta jalan (*roadmap*) dalam menjalankan visi Presiden guna mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk peningkatan anggaran seiring dengan meningkatnya tantangan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, melalui:
 - a. pendirian LOKA POM di beberapa daerah untuk menjangkau daerah yang jauh dari jangkauan Balai dan Balai Besar POM;
 - b. memperbanyak mobil laboratorium agar pemeriksaan produk obat dan makanan bisa dilakukan dengan cepat;
 - c. peningkatan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang baik dan sehat; dan
 - d. pendampingan yang lebih intensif terhadap UMKM di bidang pangan olahan, obat bahan alam, dan kosmetik.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mengambil respon cepat dalam penanganan kasus pelanggaran keamanan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengetatan peredaran terhadap bahan baku/bahan tambahan yang mengandung bahan berbahaya bagi produk obat, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan.
6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini paling lambat Selasa, 5 November 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 29 Oktober 2024

KEPALA BPOM



TARUNA IKRAR

KETUA RAPAT,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
A-416